

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024**



**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan media pertanggung jawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024- 2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sidenreng Raappang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pangkajene Sidenreng, 17 Maret 2025

The stamp is circular with a purple border. Inside the border, the text "BUPATI SIDENRENG RAPPANG" is written in a semi-circle at the top, and "SIDENRENG RAPPANG" is written in a semi-circle at the bottom. In the center of the stamp is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with the motto "KORPRI" below it. A blue ink signature is written over the stamp.
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.3 Pertumbuhan Ekonomi	8
1.4 Kondisi Pemerintahan	9
1.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
2.1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026	15
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	24
3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang	26
3.3 Realisasi Anggaran	62
3.4 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024	65
BAB IV PENUTUP	74

LAMPIRAN :

1. Pernyataan Telah Direviu Oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Rencana Kinerja Tahunan 2025 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Penghargaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha) dan Jumlah Desa/Kelurahan	3
Tabel 1.2	Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappanh Tahun 2018	6
Tabel 1.3	Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang	7
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	8
Tabel 1.5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional (2018-2022)	9
Tabel 1.6	Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang Menjadi Kewenangan Daerah	12
Tabel 1.7	Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin	14
Tabel 1.8	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Tabel 2.1	Pernyataan Visi, Pokok Visi dan Penjelasan Visi	16
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Target Kinerja	20
Tabel 2.3	Indikator Utama Tahun 2024-2026	21
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja tahun 2024	23
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	25
Tabel 3.2	Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024	26
Tabel 3.3	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	27
Tabel 3.4	Perkembangan Pencapaian Tujuan 1	27
Tabel 3.5	Perbandingan Target Realisasi Tujuan 1 dengan Target RPD ..	28
Tabel 3.6	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 1	29
Tabel 3.7	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	30
Tabel 3.8	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 1	31

Tabel 3.9	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 1 dengan Target Jangka Menengah	31
Tabel 3.10	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 1	32
Tabel 3.11	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	33
Tabel 3.12	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 2	33
Tabel 3.13	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 2 Dengan Target Jangka Menengah	34
Tabel 3.14	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 2	34
Tabel 3.15	Target Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2	35
Tabel 3.16	Perkembangan Pencapaian Sasaran Tujuan 2	35
Tabel 3.17	Perbandingan Target Realisasi Tujuan 2 Dengan RPD	36
Tabel 3.18	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Tujuan 2	37
Tabel 3.19	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3	38
Tabel 3.20	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 3	38
Tabel 3.21	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 3 Dengan Target Jangka Menengah	39
Tabel 3.22	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 3	42
Tabel 3.23	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4	43
Tabel 3.24	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 4	43
Tabel 3.25	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 4 dengan Target Jangka Menengah	44
Tabel 3.26	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 4	45
Tabel 3.27	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5	45
Tabel 3.28	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 5	46
Tabel 3.29	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 5	46
Tabel 3.30	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 5	47
Tabel 3.31	Target Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3	48

Tabel 3.32	Perkembangan Pencapaian Tujuan 3	48
Tabel 3.33	Perbandingan Target Realisasi Tujuan 3 Dengan RPD	49
Tabel 3.34	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Tujuan 3	50
Tabel 3.35	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6	51
Tabel 3.36	Perkembangan Pencapaian Sasaran 6	51
Tabel 3.37	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 6 Dengan RPD	52
Tabel 3.38	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 6	53
Tabel 3.39	Target Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4	53
Tabel 3.40	Perkembangan Pencapaian Tujuan 4	54
Tabel 3.41	Perbandingan Target Realisasi Tujuan 4 Dengan Target Jangka Menengah	54
Tabel 3.42	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Tujuan 4	55
Tabel 3.43	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7	56
Tabel 3.44	Perkembangan Pencapaian Sasaran 7	56
Tabel 3.45	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 7 Dengan RPD	56
Tabel 3.46	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 7	57
Tabel 3.47	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8	58
Tabel 3.48	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 8	58
Tabel 3.49	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 8 dengan Target Jangka Menengah	59
Tabel 3.50	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 8	59
Tabel 3.51	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9	60
Tabel 3.52	Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 9	61
Tabel 3.53	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 9 Dengan Target Jangka Menengah	61
Tabel 3.54	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 9	62
Tabel 3.55	Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama	63

Tabel 3.56	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	67
Tabel 3.14	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 2	34
Tabel 3.15	Target Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2	35
Tabel 3.16	Perkembangan Pencapaian Sasaran Tujuan 2	35
Tabel 3.17	Perbandingan Target Realisasi Tujuan 2 Dengan RPD	36
Tabel 3.18	Efisiensi Pengguna Sumber Daya Tujuan 2	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten / kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

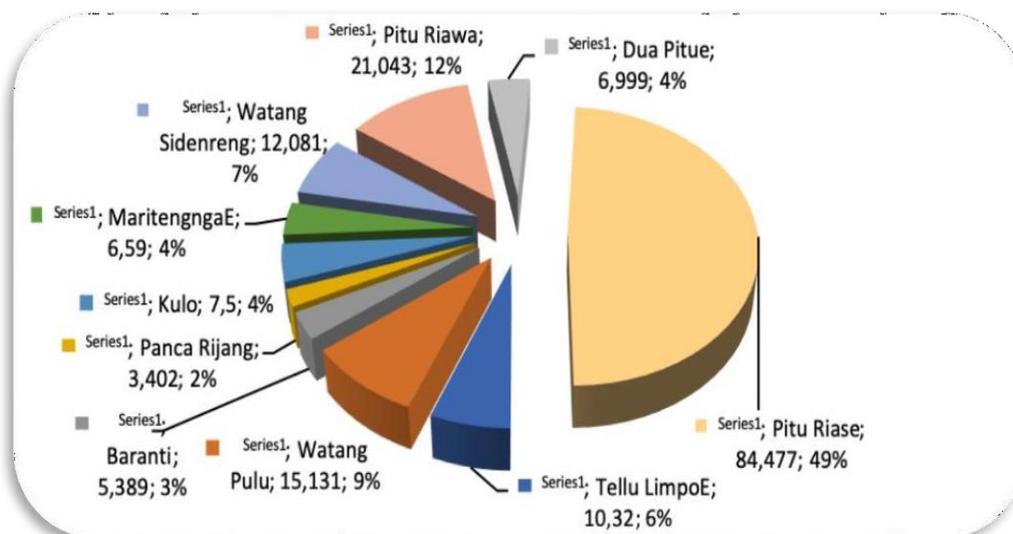
Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
Menurut Kecamatan (Ha) dan Jumlah Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan	Luas(Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
1	PancaLautang	15.393	3	7
2	TelluLimpoE	10.320	6	3
3	WatangPulu	15.131	5	5
4	Baranti	5.389	5	4
5	PancaRijang	3.402	4	4
6	Kulo	7.500	-	6
7	MaritengngaE	6.590	7	5
8	WatangSidenreng	12.081	3	5
9	PituRiawa	21.043	2	10
10	Dua Pitue	6.999	2	8
11	PituRiase	84.477	1	11
Jumlah		188.325	38	68

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan informasi pada Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa dari 11 kecamatan, terlihat bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Pitu Riase dengan luas 84.477 Ha, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Maritengngae dengan luas 6.590 Ha, secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Grafik 1.1
Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

1.2.2. Kondisi Topografi

Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari kondisi kelerengan dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:

- Lereng 0-2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha, kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 % dari luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%) luas areal yang berlereng 0–2%. Lereng 2-15 % meliputi 4,6% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini baik dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah sawah, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha atau 26,23%, Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%) dan Tellu LimpoE seluas 715 Ha atau 8,13 %. Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua pituE tidak terdapat jenis kelerengan ini. Lereng 15-40 % meliputi 16,68% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31,414 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar

pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini masih cukup baik dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan

- Perkebunan dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan, Kecamatan yang mempunyai lereng 15-40 % paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha atau 11,37%, Pitu Riase seluas 3.456Ha (11%), Tellu LimpoE mempunyai luas dengan kelerengan 15-40% 2.244Ha (7,14%) dan Kecamatan Wattang Pulu seluas 1.658Ha (5,28%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua PituE tidak terdapat jenis kelerengan ini.
- Lereng di atas 40 % meliputi 34,31% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614Ha. Daerah ini merupakan daerah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan yang mempunyai lereng diatas 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu LimpoE mempunyai luas 2.524 Ha (3,91 %), Panca Lautang seluas 2.138 Ha atau 3,31%, dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.549Ha (2,04%). Kondisi topografi untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi dengan daratan tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1000 M diatas permukaan laut (dpl), dan dataran terendah adalah Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25Mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, kemudian berbukit dan terakhir adalah Rawa Danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae dan Dua PituE kondisi topografi 100% tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu LimpoE, Watang Pulu dan Pitu Riase didominasi keadaan tanah bergunung. Kondisi Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.2
Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018

No	Kecamatan	Keadaan Tanah(%)				
		Datar	Berbukit	Bergunung	Rawa /Danau	Total
1	PancaLautang	15	25	57	3	100
2	TelluLimpoE	15	35	49	1	100
3	WatangPulu	25	5	70	-	100
4	Baranti	100	-	-	-	100
5	PancaRijang	97	3	-	-	100
6	Kulo	90	5	5	-	100
7	MaritengngaE	100	-	-	-	100
8	WatangSidenreng	85	15	-	-	100
9	PituRiawa	60	10	30	-	100
10	DuaPitue	100	-	-	-	100

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2018

1.2.2. Kondisi Pengguna Lahan

Sumber daya lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas Sawah, Pemukiman, Kebun Campur, Ladang, Kolam/ Tambak/ Rawa, Danau/ Sungai, Perkebunan Rakyat, Hutan, Lapangan Olahraga, Semak/ Belukar.

Penggunaan lahan didominasi oleh Kawasan Hutan dengan luas 82.669,05 Ha atau mencapai 43,89% dari total luas wilayah Kabupaten sebesar 188.325 Ha, dan Persawahan dengan luas 38.989,58 Ha atau sebesar 20,70% dari luas kabupaten. Khusus untuk kawasan permukiman dengan luas 5.989,95 (3,18%) dengan luas permukiman yang paling besar berada di Kecamatan Maritengngae dengan luas 1.154,57Ha dan yang paling kecil Kecamatan Baranti dengan luas 282,58 Ha. Secara lengkap struktur penggunaan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 1.3
Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	PERUNTUKAN KAWASAN BUDIDAYA	LUAS LAHAN(Ha)
1	Sawah	38.989,58
2	Permukiman	5.989,95
3	KebunCampur	22.403,32
4	Ladang/Tegalan	2.487,02
5	Kolam/Tambak/Rawa	265,10
6	Danau/Sungai	5.867,86
7	PerkebunanRakyat	9.323,65
8	Hutan	82.669,05
9	LapanganOlahraga	5,83
10	Semak/Belukar	20.323,64
	Total	188.325,00

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

1.2.3 Aspek Demografi

Jumlah penduduk merupakan salah satu potensi oleh suatu daerah dalam menyediakan tenaga kerja dengan kriteria keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pembangunan. Potensi demografi ini harus dapat diimbangi dengan kualitas kehidupan yang baik agar jumlah penduduk yang besar tersebut tidak menjadi beban tetapi membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi disuatu daerah termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018 – 2022

Kecamatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panca Lautang	17.091	17.018	19.179	19.265	19.410
Tellu Limpoe	23.903	23.972	25.726	25.887	26.126
Watang Pulu	36.747	37.592	37.186	37.731	38.398
Baranti	30.562	30.785	33.256	33.610	34.070
Panca Rijang	28.947	29.101	31.808	32.119	32.530
Kulo	12.358	12.449	13.939	14.137	14.381
Maritengngae	51.329	51.861	54.291	54.831	55.544
Watang Sidenreng	17.972	18.037	20.201	20.416	20.695
Pitu Riawa	26.390	26.489	29.663	29.985	30.402
Dua Pitue	29.547	29.783	31.389	31.634	31.977
Pitu Riase	24.227	24.885	23.350	23.579	23.883
Sidenreng Rappang	299.073	301.972	319.988	323.194	327.416

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar perekonomian sebuah daerah berdasarkan produksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Semakin cepat laju pertumbuhan PDRB, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah menghasilkan dan jasa mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi masuk menjadi salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan masyarakat sebab kemakmuran penduduk selalu dimulai dari aktivitas ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 cenderung melambat. Pertumbuhan tertinggi sepanjang periode ini yaitu tahun 2021, dengan nilai sebesar 5,54 persen, kemudian turun ke 5,02 persen pada tahun 2018, dan terus mengalami penurunan yaitu 4,65 persen pada tahun 2019, sampai akhirnya mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -0,59 persen. Fenomena

terkontraksinya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pandemi covid-19 dan menurunnya produksi pertanian sebagai sektor penopang perekonomian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2022, perekonomian kembali membaik yang ditandai dengan tumbuhnya perekonomian sebesar 4,86 persen. angka ini juga melampaui target RKPD 2022 yang berada derange 4,39-5,86%. Hal ini disebabkan karena pandemic covid-19 sudah mulai dapat dikendalikan dan meningkatnya produksi pertanian sebagai sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tidak lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, yang berada diangka 5,09 persen untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan 5,31 persen untuk Nasional di tahun 2022. Bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah setarayang nilainya sebesar 4,80 persen, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang masih berada di atas rata-rata.

Tabel 1.5
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional (2018-2022)

Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	Target 2022	Capaian 2022
Kab. Sidenreng Rappang	%	5,02	4,65	-0,59	5,54	4,39-5,86	4,86
Provinsi Sulawesi Selatan	%	7,04	6,91	-0,7	4,65		5,09
Nasional	%	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,2	5,31

Sumber : BPS Sulawesi Selatan; 2023

1.4 Kondisi Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;

- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - 2. Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe B yang Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - 3. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 4. Dinas Sosial merupakan Tipe C Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social;
 - 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Tipe A menyelenggarakan dan desa, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
 - 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu merupakan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - 9. Dinas perdagangan dan Perindustrian merupakan Tipe B Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - 10. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan persandian;
 - 11. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan perumahan Rakyat merupakan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

- pekerjaan umum dan panataan ruang, urusan pemerintahan bidang petanahan, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
12. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 13. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan merupakan Tipe A yang Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan bidang ketahanan pangan;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 16. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 17. Dinas Perhubungan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 18. Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjaang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 2. Badan Pengelolah Keuangan Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang fungsi keuangan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian pengembangan sumber daya manusia;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana Daerah;
 6. Badan Pendapatan Daerah Tipe melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Panca Lautang merupakan Kecamatan Tipe A;
 2. Kecamatan Tellu Limpoe merupakan Kecamatan Tipe A;
 3. Kecamatan Watang Pulu merupakan Kecamatan Tipe A;
 4. Kecamatan Baranti merupakan Kecamatan Tipe A;
 5. Kecamatan Panca Rijang merupakan Kecamatan Tipe A;
 6. Kecamatan Kulo merupakan Kecamatan Tipe A;
 7. Kecamatan Maritengngae merupakan Kecamatan Tipe A;
 8. Kecamatan Watang Sidenreng merupakan Kecamatan Tipe A;
 9. Kecamatan Pitu Riawa merupakan Kecamatan Tipe A;
 10. Kecamatan Dua Pitue merupakan Kecamatan Tipe A;
 11. Kecamatan Pitu Riase merupakan Kecamatan Tipe A;

Tabel 1.6
 Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Yang Menjadi
 Kewenangan Daerah

NO	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar, PAUD dan NonFormal
2	Kesehatan	-
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	-
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	-
6	Sosial	-
	URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)	
1	Tenaga Kerja	-
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
3	Pangan	-
4	Pertanahan	-
5	Lingkungan Hidup	-

6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
9	Perhubungan	-
10	Komunikasi dan Informatika	-
11	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Koperasi dan Usaha Mikro
12	Penanaman Modal	-
13	Kepemudaan dan Olah Raga	-
14	Statistik	-
15	Persandian	-
16	Kebudayaan	-
17	Perpustakaan	-
18	Kearsipan	-
	URUSAN PILIHAN	
1	Kelautandan Perikanan	Perikanan
2	Pariwisata	-
3	Pertanian	-
4	Perdagangan	-
5	Kehutanan	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten
6	Energi dan Sumber Daya Meneral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung Panas bumi dalam daerah Kabupaten
7	Perindustrian	-
8	Transmigrasi	-

1.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara

a) Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tabel 1.7
Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	1.978	39,27%
2.	Perempuan	3.058	60,72%
	Total	5.036	100%

Sumber : BKD Kab.Sidrap keadaan Desember 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa PNS didominasi oleh perempuan sebanyak 3.056 orang atau 60,72% sedangkan laki-laki sebanyak 1.918 orang atau 39,27% dari total PNS yang ada.

b) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.8
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	JumlahPNS	
		Jumlah	Persentase%
1	S.3	2	0.03%
2	S.2	563	11.18%
3	S.1	3.174	63.03%
4	D.IV	97	1.93%
5	D.III	463	9.19%
6	D.II	48	0.96%
7	D.I	10	0.19%
8	SLTA	635	12.62%
9	SLTP	35	0.70%
10	SD	9	0.17%
	Total	5.036	100%

Sumber : BKD Kab. Sidrap Keadaan Desember 2019

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Rencana juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara periodisasi perencanaan pembangunan daerah, untuk tahun perencanaan 2024-2026 merupakan bagian/tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 yang menjadi acuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam kondisi masa jabatan kepala daerah berakhir. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk kurun waktu 2024-2026.

Perencanaan Tahun 2024-2026 adalah periode perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah disusun dengan periode 3 (tiga) tahun saja Tahun 2024-2026 dan bukan merupakan penjabaran dari janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal tersebut disebabkan karena telah berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, sementara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baru akan dilaksanakan serentak pada Tahun 2024.

2.1.1 Visi Misi

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 merupakan periode keempat atau periode terakhir dalam periode RPJP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025. Arah kebijakan pada tahun 2024 diarahkan dalam rangka lebih memantapkan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005- 2025.

Visi Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah "Terwujudnya Sidenreng

Rappang sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025”

Tabel 2.1
Pernyataan Visi, Pokok Visi dan Penjelasan Visi

Visi “Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025”		
No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Misi 1: Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam		
1	Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Optimal	<p>Terkelolanya SDA secara seimbang, berkelanjutan konsisten dan penegakan hukum secara tegas dan adil. Upaya seperti ini diyakini akan mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA. Peningkatan kualitas dimaksud diperlukan untuk menjamin pengelolaan SDA yang lebih efisien, efektif dan berkualitas. Untuk maksud tersebut diperlukan peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.</p> <p>Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan diyakini tidak akan mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.</p>
Misi 2: Mengembangkan system agribisnis		
2	Terwujudnya Sistem agribisnis Yang Mapan	<p>Terwujudnya system agribisnis yang berintegrasi dengan mensinergikan pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan serta kehutanan. Dengan pembangunan industri dan jasa penunjang lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut upaya yang dilakukan antara lain peningkatan koordinasi antar sektor dan antar pelaku, pengembangan wilayah berbasis tata ruang dan pembangunan kawasan industry terpadu.</p> <p>Meningkatnya daya saing produk-produk hasil usaha agribisnis yang ditandai dengan meningkatnya pangsa pasar dan meluasnya akses pasar. Peningkatan daya saing dimaksud diperlukan karena kian ketatnya persaingan di pasar internasional dan kecenderungan melemahnya daya saing komoditas di pasar internasional. Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas produksi, peningkatan promosi produk, peningkatan produktifitas sumberdaya manusia, peningkatan efisiensi proses produksi, pengembangan teknologi produksi, pengembangan kerjasama regional dan internasional dan penguatan asosiasi komoditas ekspor.</p> <p>Terwujudnya usaha-usaha agribisnis yang berkerakyatan, yaitu dengan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasi rakyat banyak, menjadikan organisasi ekonomi dan jaingan kelembagaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan system agribisnis sehingga nilai tambah yang tercipta dapat dinikmati secara nyata oleh rakyat banyak. Oleh Karena itu penguatan kelembagaan pelaku agribisnis, peningkatan akses pelaku agribisnis terhadap sumberdaya dan pasar, pembinaan jiwa kewirausahaan para pelaku agribisnis merupakan sejumlah aspek yang akan memperoleh perhatian dimasa yang akan datang.</p>

Visi "Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025"		
No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
		Misi 3: Membangun Kemandirian Masyarakat
		Misi 4: Membangun Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Kepemerintahan Yang Bersih (Clean Governance)
3	Terwujudnya Kemandirian Daerah	<p>Terbangunnya jaringan kerjasama antar dan inter daerah. Kerjasama antar daerah tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya, membangun sinergitas dalam menangani masalah-masalah skala regional, berbagi praktek terbaik dalam mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara internal. Beberapa upaya upaya yang dapat dikembangkan antara lain penetapan dan pengimplementasian zona pengembangan agribisnis, peningkatan keunggulan wilayah berdasarkan karakteristik lokal, pengembangan pusat pelayanan kerjasama antar wilayah dan daerah dan identifikasi potensi dan peluang kerjasama antar daerah.</p>
		Bertumbuhnya dengan cepat wilayah-wilayah strategis sehingga dapat mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah tertinggal disekitarnya dalam suatu system wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis dengan lebih menekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi daerah
		Meningkatkan kapasitas fiskal dan kemampuan pembiayaan pembangunan. Masih rendahnya kapasitas fiskal disatu sisi dan semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan public disisi lain menyebabkan pemerintah perlu melakukan upaya-upaya antara lain peningkatan penerimaan daerah, pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah, peningkatan pembiayaan swadaya masyarakat, peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan dari luar dan pengembangan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur publik.
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia. Peningkatan SDM aparat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan SDM masyarakat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan SDM pelaku usaha diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Peningkatan SDM dimaksud dapat dilakukan dengan cara pengembangan pendidikan formal dan non formal, pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional dan substantif dan pengembangan sistim magang.
		Terimplementasinya konsep tata ruang yang bersifat komperhensif dan terpadu melalui penyusunan peta tata ruang manual dan digital, peningkatan koordinasi antar sektor dan antar pelaku dalam penyusunan tata ruang, peningkatan pemahaman tenaga perencana mengenai Geoggraphic Information system (GIS) dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung GIS.
		Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara konsisten di segala bidang, pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan, pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup dan peningkatan daya dukung lingkungan.

		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dengan menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah melalui pengembangan kemampuan produksi yang didukung kelembagaan ketahanan pangan, upaya ini dilakukan agar mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata dan terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
		Terkendalinya aktifitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebagai paru-paru bumi dan sumber keseimbangan tata air, hutan harus tetap dijaga kelestariannya. Untuk hal tersebut perlu dilakukan pencegahan pembalakan hutan, penegakan hukum secara konsisten, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan dan sosialisasi konsep pembangunan berwawasan lingkungan.
		Membaiknya posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Membangun kualitas SDM merupakan suatu yang sangat mendasar karena SDM merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IPM adalah perbaikan kualitas pendidikan dasar dan menengah, peningkatan dan perluasan fasilitas kesehatan, peningkatan akses penduduk untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat.
		Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan ukuran pemberdayaan gender (UPG) menjadi alasan utama mengapa masalah gender masih perlu ditangani secara serius. Menyangkut hal ini beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain sosialisasi pengarusutamaan gender, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan anggaran yang berspektif gender dan peningkatan kegiatan pemberdayaan perempuan.
		Menurunnya angka kemiskinan. Masih relative tingginya angka kemiskinan menyebabkan masalah ini patut mendapat perhatian serius. Masalah kemiskinan dimaksud bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan dan kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga kerentanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui tiga jalur utama yaitu pengembangan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kaum miskin, peningkatan anggaran yang berpihak kepada kaum miskin, dan pengembangan Komite Pemberantasan Kemiskinan.
Misi 5: Membangun Kehidupan Sosial Budaya		
Misi 6: Mengaktualisasikan nilai nilai agama		
4	Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Relegius	Lestarnya nilai-nilai budaya lokal yang diharapkan dapat membentuk karakter dan jati diri daerah sehingga dapat merespon modernisasi secara positif dan produktif. Pelestarian nilai-nilai dimaksud dilakukan melalui peningkatan

Visi "Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025"		
No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
		<p>kesadaran khususnya dikalangan generasi muda akan pentingnya mempertahankan budaya lokal, peningkatan keterlibatan keseluruhan lapisan masyarakat secara partisipatoris dalam melestarikan budaya lokal.</p> <p>Lestarnya kebudayaan dan kesenian lokal diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia. Pelestarian dimaksud dilakukan melalui peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal, pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan kesenian secara berkala dan promosi kebudayaan dan kesenian lokal dalam berbagai ajang pameran dan festival kebudayaan dan kesenian.</p> <p>Tergalinya dan berkembangnya nilai-nilai kearifan lokal yang semakin disadari merupakan modal social yang diperlukan baik dalam kaitan dengan pembangunan daerah maupun dalam tata pergaulan regional dan global. Nilai-nilai kearifan lokal dimaksud dikembangkan melalui identifikasi nilai-nilai kearifan lokal, mendokumentasikan dan mempublikasikan nilai-nilai kearifan lokal, memasyarakatkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal tersebut dalam segala dimensi kehidupan masyarakat lokal.</p> <p>Berkembangnya budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) guna meningkatkan daya saing daerah. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis dan kreatif sehingga pada gilirannya tradisi iptek dapat berkembang.</p> <p>Terpeliharanya kerukunan antar dan antar umat beragama agar tercipta suasana masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa upaya yang dapat dilakukan peningkatan peran dan fungsi badan kerjasama antar umat beragama, peningkatan peran dan tokoh-tokoh agama dan mengaktifkan dialog-dialog lintas agama secara berkala.</p> <p>Terimplementasinya nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya-upaya yaitu keteladanan para tokoh agama, pimpinan daerah, tokoh masyarakat, pembangunan dan pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana ibadah dan pembinaan keagamaan secara dini dikalangan generasi muda.</p>

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Targret Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Startegis	
1	2	3	4	
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian Daerah	1 Peningkatan Pengelolaan Agribisnis Ekonomi Potensi	
		Sasaran 2: Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	2 Mendorong Akses dan Kesempatan kerja, Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	
		Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya manusia	3 Perbaikan Kualitas Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta Pemberdayaan perempuan Dan Anak
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 4 : Berkurangnya Ketimpangan Pendapatan	4 Penghapusan Kemiskinan Eks, Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	
		Sasaran 5 : Membaiknya Kehidupan Sosial Masyarakat	5 Peningkatan Ketentraman dan Ketetapan Umum melalui Pengalaman Kepemudaan dan Keagamaan	
		Tujuan 3 :	Sasaran 6 Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	6 Mengoptimalisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
3	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Tujuan 4 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sasaran 7 : Meningkatnya Akuntabilitas KinerjaInstansi pemerintah	7 Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien
		Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas pelayanan Masyarakat	8 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Inovasi	
		Sasaran 9 : Meningkatkan Tata Kelola Keuangan	9 Peningkatan Ketentraman dan Ketetapan Umum melalui	

Sumber : RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

2. 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target			
						2024	2025	2026	
1	Tujuan 1 :		1 Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	51.00	53.97	56.54	59.70	
	Meningkatnya pembangunan ekonomi	Sasaran 1:							
		Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.86	5.76	6.17	6.58
		Sasaran 2:							
	Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.56	3.47	3.42	3.38	
2	Tujuan 2 :		4 Tingkat Kemiskinan	Juta Rupiah	51.00	53.97	56.54	59.70	
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 3:							
		Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia	5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.06	73.21	73.73	74.21
			6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.20	92.66	92.89	93.12
		Sasaran 4 :							
		Bekurangnya Ketimpangan Pendapatan	7	Gini Ratio	Poin	0.354	0.343	0.338	0.334
		Sasaran 5 :							
	Membbaiknya Kehidupan Sosial kemasyarakatan	8	Tingkat kriminalitas yang tertangani	Persen	74.07	77.20	78.20	79.70	
3	Tujuan 3 :		9 Indeks kualitas Lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	64.05	65.86	66.55	67.85	
	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung	Sasaran 6 :							
	Meningkatnya Mitigasi bencana	10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	119.20	116.15	115.15	114.15	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target			
						2024	2025	2026	
4	Tujuan 4:		11 Indeks Reformasi Birokrasi	Indek	53.16 (CC)	58.36 (CC)	61.15 (B)	64.07 (B)	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sasaran 7 :							
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12	Nilai Sakip	Poin	62.60 (B)	65.89 (B)	68.82 (B)	72.44 (BB)
		Sasaran 8 :							
		Meningkatnya Kualitas pelayanan Masyarakat	13	IKM	Persen	78.85 (B)	80.33 (B)	81.84 (B)	83.38 (B)
		Sasaran 9 :							
Meningkatnya Tata kelola keuangan Daerah yang Efisien, Efesien, Transparan dan Akuntabel	14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	53.08	65.33	70.35	75.65		

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi ;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan /kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah sebagaiberikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	1	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	53.97
		2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.76
2	Meningkatnya akses dan kesempatan Kerja	3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.47
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4.52
		5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73.21
		6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.66
4	Berkurangnya Ketimpangan Pendapatan	7	Gini Ratio	Poin	0.354
5	Membaiknya Kehidupan Sosial Kemasyarakatan	8	Tingkat Kriminalitas yang tertangani	Persen	77.2
		9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64.05
6	Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	10	Indeks Resiko Bencana	Indeks	119.2
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58.36 (CC)
		12	Nilai Sakip	Poin	65.89 (B)
8	IKM	13	IKM	Persen	80.33 (B)
9	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	65.33

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudiandikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik.

3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indicator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan

Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indicator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi kinerja
1	91%≤	Sangat Tinggi
2	76% sd.90 %	Tinggi
3	66% sd.75 %	Sedang
4	51% sd.65 %	Rendah
5	50%	Sangat Rendah

Secara umum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023–2026.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya Produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	1	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	53.97	59.31	110 %
		2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.76	4.05	70 %
2	Meningkatnya akses dan kesempatan Kerja	3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.47	3.02	87%
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4.52	5.02	111%
		5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73.21	74.81	102%
		6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.66	92.53	99.89
4	Berkurangnya Ketimpangan Pendapatan	7	Gini Ratio	Poin	0.354	0.63	94.16
5	Membaiknya Kehidupan Sosial Kemasyarakatan	8	Tingkat Kriminalitas yang tertangani	Persen	77.2	87.40	113.21
		9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64.05	67.86	106%
6	Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	10	Indeks Resiko Bencana	Indeks	116.15	119.2	103%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58.36 (CC)	68.51 (B)	117%
		12	Nilai Sakip	Poin	65.89 (B)	65.08 (B)	99%
8	IKM	13	IKM	Persen	80.33 (B)	75.455	94%
9	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	65.33	78.603	120%

Pengukuran Indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indicator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indicator adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.3
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	53,97	59,31	110%

Pengukuran capaian Indikator kinerja pertama pada sasaran 1 yaitu Meningkatnya Produktivitas Sektor-sektor Perekonomian Daerah menunjukkan realisasi capaian *Pendapatan Pekapita* 59,31 dari target 53,97 dan rata-rata capaian kinerja yaitu sebesar 110% atau tercapai dengan kriteria ***Sangat Tinggi***.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.4
Perkembangan Pencapaian Tujuan 1

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	51,00	55,51	59,31	100	100	110

Indikator Kinerja pada tujuan 1 Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Pada indikator *Pendapatan Perkapita* telah mencapai target sebesar 110%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.5
Perbandingan Target Realisasi
Tujuan 1 dengan Target RPD

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	59,31	59,70

Realisasi kinerja pada Indikator Pendapatan Perkapita sampai dengan tahun ini sebesar 59,31% sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 59,70%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang maka indikator tersebut telah mencapai target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB cenderung menurun;
2. Produksi sektor perkebunan cenderung mengalami penurunan;
3. Belum optimalnya ketersediaan prasarana pertanian;
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana pertanian;
5. Masih tingginya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
6. Keterbatasan SDM penyuluh pertanian.

Sedangkan permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pangan adalah:

1. Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat;
2. Pola konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA);
3. Masih terdapat wilayah dengan kategori rawan pangan;
4. Penanganan daerah rawan pangan belum optimal dan terintegrasi;
5. Fluktuasi harga pangan masih tinggi untuk beberapa komoditas strategis.

Ada beberapa penyebab tidak tercapainya target pada indikator sasaran **Meningkatnya Produksi Peternakan** sebagaimana yang diharapkan, yaitu :

1. Adanya alih fungsi lahan dari padang penggembalaan ke lahan jagung, porang dan perumahan yang berakibat semakin menyempitnya padang penggembalaan;
2. Berubahnya sistem pemeliharaan dari kualitas ke kuantitas;
3. Terbatasnya Straw dan N2 cair untuk inseminasi buatan (hanya disuplai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan);
4. Terbatasnya vaksin dan obat-obatan dalam rangka pengendalian penyakit hewan.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Memprioritaskan pengembangan pembangunan peternakan yang diarahkan pada peningkatan produksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan
2. Pemberian bantuan bibit ternak, pakan dan sarana peternakan kepada masyarakat
3. Pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal pada 11 (sebelas) kecamatan
4. Peningkatan KIE Penyakit Hewan
5. Peningkatan jumlah pengadaan vaksin dan obat-obatan

Capaian pada sektor UMKM :

- Guna Mendukung tumbuhnya UMKM Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memberkan kemudahan dalam perizinan;
- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan guna peningkatan pengetahuan dan skill bagi masyarakat produktif untuk membuka lapangan kerja.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.6
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 1

Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	Pendapatan Perkapita	110%	96%	14

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Tujuan ini terdiri Indikator *Pendapatan Perkapita* terdiri dari 10 program sebesar Rp.88.155.196.615,- dengan realisasi sebesar Rp.84.417 690.045-, dengan capaian sebesar 96%. Hasil Perbandingan selisih antara capaian kinerja dan Penyerapan anggaran

memiliki tingkat efisiensi sebesar 14.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pendapatan perkapita

- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
- Program penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian;
- Program pengelolaan perikanan budidaya;
- Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- Program penyuluhan pertanian;
- Program pengembangan UMKM;
- Program Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA);
- Program Penyelenggaraan Jalan;
- Persentase Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- Program Hubungan Industri.

Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas Sektor-sektor Perekonomian Daerah

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.7
Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,76	4,05	70%

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran 1 yaitu Meningkatnya Produktivitas Sektor-sektor Perekonomian Daerah menunjukkan realisasi capaian *Laju Pertumbuhan Ekonomi* 4,05 dari target 5,76 dan rata-rata capaian kinerja yaitu sebesar 70% atau tercapai dengan kriteria **Sedang**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.8
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,54	3,28	4,05	94,83	62,3	70.31

Sumberdata: Bappelitbangda Kab. Sidrap

Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 1 Meningkatnya Produktivitas Sektor-sektor Perekonomian Daerah Pada indikator *Laju Pertumbuhan Ekonomi* belum mencapai target dengan capaian sebesar 70.31%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.9
Perbandingan Target Realisasi
Sasaran 1 dengan Target Jangka Menengah

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Indeks	4,05	6,58

Realisasi kinerja pada Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi sampai dengan tahun ini sebesar 4,05% sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 6,58%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang belum mencapai target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang melambat dalam beberapa tahun terakhir perlu mendapat perhatian pemerintah. Produktivitas sektor pertanian, sebagai andalan, tidak banyak mengalami perubahan, bahkan cenderung turun. Masih terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah sampai pada titik optimum, tapi pemerintah daerah harus siap dengan kondisi tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tidak lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional di tahun 2024. Bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah setara yang nilainya sebesar 4.80 persen. Perumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang masih berada di atas rata-rata.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.10
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 1

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	70%	96%	-24

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini untuk Indikator *Laju Pertumbuhan Ekonomi* terdiri dari 8 program sebesar Rp.85.169.298.615,- dan realisasi sebesar Rp.81.432.087.168 dengan capaian sebesar 96 %. Hasil Perbandingan selisih antara capain kinerja dan penyerapan anggaran memiliki tingkat efisiensi sebesar -24.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pendapatan perkapita

- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- Program penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian
- Program pengelolaan perikanan budidaya
- Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- Program penyuluhan pertanian
- Program pengembangan UMKM
- Program Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
- Program Penyelenggaraan Jalan

Sasaran 2 : Meningkatnya Akses dan Kesempatan Kerja

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.11
Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 2

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Tingkat pengangguran Terbuka	%	3,47	3.02	112.97

Sumber data: Bappelitbangda Kab. Sidrap

Indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Akses dan Kesempatan Kerja menunjukkan realisasi sebesar 3.02 dari target 3,47 dengan capaian Kinerja sebesar 112.97% atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.12
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 2

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian(%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,56	3,29	3.02	138	141,77	112.97

Sumber data : Bappelitbangda Kab. Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis Meningkatnya akses dan kesempatan Kerja untuk tahun 2022 sampai tahun 2023, dimana menunjukkan realisasi cenderung meningkat. Di Tahun 2024 mengalami kenaikan dengan capaian 112.97%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.13
Perbandingan Target Realisasi
Sasaran 2 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.02	3.38

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 3.02% sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 3,38%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut telah melampaui target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

- Tingkat realisasi kinerja yang sangat tinggi pada sasaran Meningkatnya produktivitas tenaga kerja ini disebabkan oleh kesesuaian kualifikasi pencari kerjadengan pasar kerja yang tersedia serta informasi pasar kerja yang luas.
- Besaran pekerja/buruh yang menjadi Program jaminan Sosial;
- Persentase UMKM yang meningkat volume usahanya setelah diberdayakan.
- Peningkatan produktivitas terhadap daya saing koprasa dan UMKM dengan fasilitasi sarana bagi usaha mikro kecil.
- Meningkatnya keterampilan masyarakat dengan adanya Balai Latihan Kerja serta beberapa lembaga swasta.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.14
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 2

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Akses dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	112.97	100	12

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk mendukung sasaran

pencapaian pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka terdiri dari 2 program sebesar Rp.2.985.898.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.985.602.877,- dengan capaian sebesar 100%. Hasil Perbandingan selisih antara capaian kinerja dan Penyerapan anggaran memiliki tingkat efisiensi sebesar 12.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
- Program Hubungan Industrial

Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.15
Target Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Tingkat Kemiskinan	Persen	4.52	5.02	88.94

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja Pada Tujuan 2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan realisasi capaian *Tingkat Kemiskinan* 5.02 dari target 4.52 dan rata-rata capaian kinerja sebesar 88.94% atau tercapai dengan kriteria **Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.16
Perkembangan Pencapaian Sasaran Tujuan 2

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan	Persen	5,11	5,14	5.02	75,67	37,85	88.94

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi capaian Pada Tujuan ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Dengan Capaian di tahun 2024 sebesar 88.94%

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.17
Perbandingan Target Realisasi
Tujuan 2 dengan RPD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Tingkat Kemiskinan	Persen	5.02	3.74

Realisasi kinerja pada Indikator *Tingkat Kemiskinan* sampai dengan tahun ini sebesar 5.02% sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 3.74%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang maka indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Tercapainya sasaran “Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial” dapat diukur melalui indikator “Persentase Warga Negara yang Diberdayakan dan Menerima Perlindungan Sosial”.

Beberapa kegiatan terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat sehingga kinerja realisasi kurang maksimal. Pada Indikator Jumlah Rumah Tangga Miskin yang menjadi penghambat yang pertama adalah kurangnya SDM tenaga pendamping profesional di bidang kesejahteraan sehingga diperlukan peningkatan kapasitas, penghambat yang kedua adalah tidak adanya rumah singgah untuk menampung sementara PPKS terlantar serta kurangnya anggaran untuk mendukung proses pendamping atau assesmen bagi calon penerima bantuan dalam hal ini Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.18
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Tujuan 2

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	88.94	92	3

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat pada indikator *Tingkat Kemiskinan* terdiri dari 12 program sebesar Rp.165.537.202.662,- dengan realisasi sebesar Rp 152.117.811.088,- dengan capaian 92%. Hasil Perbandingan selisih antara capaian kinerja dan Penyerapan anggaran memiliki tingkat efisiensi sebesar 3.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- Program Pemberdayaan Masyarakat;
- Program Pengelolaan Pendidikan ;
- Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- Program Rehabilitasi Sosial;
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Menengah (UMKM);
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Limbah Air.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.18
Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73.21	74.81	102.19
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.66	92.53	99.85

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pertama pada sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia menunjukkan realisasi capaian *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* 74.81 dari target 73.21 dan rata-rata capaian kinerja sebesar 102.19% atau tercapai dengan kriteria ***Sangat Tinggi***.

Pengukuran capaian Indikator kinerja kedua pada sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia menunjukkan realisasi capaian *Indeks Pembangunan Gender (IPG)* 92.53 dari target 92.66 dan rata-rata capaian kinerja sebesar 99.85% atau tercapai dengan kriteria ***Sangat Tinggi***.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.20
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 3

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.06	72.71	74.81	100	100.73	102.19

Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	53.84	56.71	92.53	96.38	96.10	99.85
---------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pada indikator *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* dengan realisasi kinerja 74.81 dan capaian sebesar 102.19% menunjukkan indikator tersebut telah mencapai target.

Sedangkan Pada indikator *Indeks Pembangunan Gender (IPG)* dengan realisasi kinerja 92.53 dan capaian sebesar 99.85% menunjukkan indikator tersebut belum mencapai target.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.21
Perbandingan Target Realisasi
Sasaran 3 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74.81	74.21
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.53	93.12

Realisasi kinerja pada Indikator *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* sampai dengan tahun ini sebesar 74.81 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 74.21, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang maka indikator tersebut telah mencapai target jangka menengah.

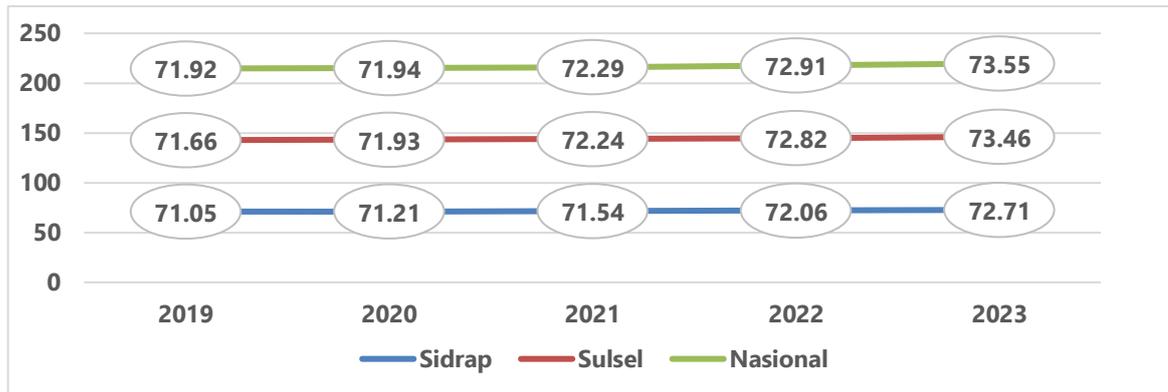
Realisasi kinerja pada Indikator *Indeks Pembangunan Gender (IPG)* sampai dengan tahun ini sebesar 92.53 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 93.12, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang maka indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Kabupaten Sidenreng Rappang boleh disebut sebagai daerah yang sedang menikmati bonus demografi, seperti disampaikan pada bagian aspek demografi, sebab proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia belum dan tidak produktif. Seharusnya struktur penduduk tersebut bias menjadi modal utama pembangunan daerah. Namun demikian, besarnya jumlah populasi penduduk tidak menjamin kemajuan pembangunan daerah, jika kualitas manusianya minim. Ukuran umum yang digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia sebuah negara/daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang dibangun dari tiga komponen yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang nilainya dikelompokkan menjadi empat kategori mulai dari IPM sangat tinggi dengan nilai lebih 80, IPM sedang 70 hingga 80 dan IPM rendah bernilai dibawah 60.

Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir cukup baik dilihat dari nilai IPM yang konsisten meningkat. Pada tahun 2019, status IPM Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai kategori tinggi karena berhasil mencapai angka 71,05 dan kinerja tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi 71,21. Selanjutnya Pada Tahun 2021 mencatatkan IPM 71.54 dan terus mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 72,06 dan pada tahun 2023 mencapai angka 72,71. Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, maka capaian Kabupaten Sidenreng Rappang lebih rendah, seperti pada gambar berikut:

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut.

Indeks Pembangunan Gender secara keseluruhan dari tahun 2018-2022 cenderung mengalami tren meningkat namun tidak terlalu berbeda nilai indeksnya dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk baik. Terdapatnya kesenjangan atau gap antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari berbagai bidang atau komponen pembentuk IPG itu sendiri yaitu, pada bidang pendidikan, kesehatan dan sumbangan pendapatan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Terwujudnya Pengarusutamaan Generasi. Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan beberapa kegiatan sesuai anggaran yang tersedia, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A);
4. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
5. Evaluasi pelaksanaan PUG;
6. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.22
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 3

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	102.19	92	10
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99.85	92	-7.85

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia pada indikator *Indeks Pembangunan Manusia Kemiskinan* terdiri dari 5 program sebesar Rp.157.481.393.502,- dengan realisasi sebesar Rp 145.346.944.941,- dengan capaian 92%. Hasil Perbandingan selisih antara capaian kinerja dan Penyerapan anggaran memiliki tingkat efisiensi sebesar 10. Selanjutnya untuk Indikator Ke dua Yaitu *Indeks Pembangunan Gender* terdiri dari 5 program sebesar Rp.157.481.393.502,- dengan realisasi sebesar Rp 145.346.944.941,- dengan capaian 92%. Hasil Perbandingan selisih antara capaian kinerja dan Penyerapan anggaran memiliki tingkat efisiensi sebesar -7.85.

e. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- Program Pemberdayaan Masyarakat;
- Program Pengelolaan Pendidikan ;
- Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- Program Rehabilitasi Sosial;
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Menengah (UMKM);
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;

- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Limbah Air.

Sasaran 4: Berkurangnya Ketimpangan Pendapatan

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.23
Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024(%)
		Target	Realisasi	
Gini Ratio	Poin	0.343	0.363	94.16

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran Menurunnya Berkurangnya Ketimpangan Pendapatan menunjukkan realisasi 0.363 dari target 0.343 dan mencapai target yaitu sebesar 94.16% di tahun 2024 dengan kriteria ***Sangat Tinggi***.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.24
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 4

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Gini Ratio	Poin	0.354	0.345	0.363	94.33	94.82	94.16

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi capaian Pada sasaran ini cenderung mengalami tren peningkatan dari tahun 2022-223. Sedangkan capaian di tahun 2024 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 94.16%

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.25
Perbandingan Target Realisasi Sasaran 4
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Gini Ratio	Poin	0.363	0.334

Realisasi kinerja pada Indikator sampai dengan tahun ini sebesar 0.363 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 0.334 perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Gini Rasio digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk, angka koefisien gini berkisar antara 0-1, semakin mendekati 0 nilai ini, semakin tidak timpang pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah.

Tingkat ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir mengalami tren penurunan. Di tahun 2023, indeks gini menyentuh angka 0,354 poin tertinggi selama lima tahun terakhir dan mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2023 menjadi 0,354 dan 0.363 poin di tahun 2024, yang berarti ketimpangan pendapatan masyarakat semakin rendah. Sedangkan di tahun 2024 rasio gini Kabupaten Sidenreng Rappang turun dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar xx poin. Salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan yaitu Kesenjangan antara penduduk antara yang kaya dan miskin semakin melebar.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.26
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 4

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Berkurangnya Ketimpangan Pendapatn	Gini Rato	94.16	84	10.16

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran Berkurangnya Ketimpangan Pendapatan Indikator Gini Ratio. terdiri dari 7 program sebesar Rp.8.055.809.160,- dengan realisasi sebesar Rp.6.770.866.147,- dengan capaian 84%. Hasil Perbandingan selisih antara capaian kinerja dan Penyerapan anggaran memiliki tingkat efisiensi sebesar 10.16

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Program Rehabilitasi Sosial;
- Program Perlindungan dan jaminan sosial;
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Limbah Air.

Sasaran 5 : Membaiknya Kehidupan Sosial Kemasyarakatan

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.27
Target Capain Indikator Kinerja Sasaran 5

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
1 Tingkat Kriminalitas yang Tertangan	Persen	77,20	87.40	113,21

Sumber data: Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja tingkat kriminalitas yang tertangani pada sasaran ini menunjukkan realisasi sebesar 87.40 dari target 77,20 dengan capaian kinerja yaitu sebesar 113.21%, dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.28
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 5

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian(%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tingkat Kriminalitas yang Tertangani	Persen	74.07	87.40	87.40	97	98.85	113.21

Sumber data: Bappelitbangda Kab. Sidrap

Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 5 Membaiknya Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Pada indikator *Tingkat Kriminalitas yang Tertangani* cenderung mangalami tren peningkatan dari tahun 2022 – 2024. Dengan Capaian di tahun 2024 mencapai 113.21 %

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.29
Perbandingan Target Realisasi Sasaran 5

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Tingkat Kriminalitas yang Tertangani	Persen	87.40	79.70

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 87.40 persen sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 79.70 persen perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut telah melampaui target.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian kinerja pada indikator Tingkat Kriminalitas yang Tertangani dengan capaian 113.21 % dengan faktor penyebab peningkatannya sebagai berikut :

1. Terjalannya Koordinasi diantara pemangku kepentingan dalam menangani dan menyelesaikan setiap permasalahan di lapangan;
2. Adanya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya ketertiban, ketentraman dan keindahan;
3. Tersedianya anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. Sarana/fasilitas perlengkapan pendukung kegiatan yang memadai.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.30
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 5

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Membaiknya Kehidupan Sosial Kemasyarakatan	Tingkat Kriminalitas yang tertangani	113.21	96	-17.21

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada indikator Tingkat Kriminalitas yang Tertangani yang terdiri dari 3 program sebesar Rp.9.178.144.000,- dengan realisasi sebesarRp.8.810.303.310,- dengan capan sebesar 96%%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 113.21%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar -17.21.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Dan Fasilitasi penangan konflik Sosial.
- Program Pemerintah dan kesejahteraan Rakyat.

Tujuan 3 : Mewujudkan Penelolan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.31
Target Capain Indikator Tujuan 3

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65.86	67.96	103.19

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada Tujuan 3 Mewujudkan Penelolan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan menunjukkan realisasi 67.96 dari target 65.86 dan mencapai target yaitu sebesar 103.19% dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

c.

Tabel 3.32
Perkembangan Pencapaian Tujuan 3

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66.55	65.79	67.96	99.46	97.50	103.19

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi capaian Indikator Kinerja pada tujuan 3 Mewujudkan Penelolan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan untuk tahun 2022 sebesar 99.46%, di tahun 2023 menurun dengan capaian 97.50 sedangkan di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 103.19 %.

d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.33
Perbandingan Target Realisasi Tujuan 3 dengan RPD

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65.86	67.86

Realisasi kinerja pada Indikator sampai dengan tahun ini sebesar 65.86 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 67.86 perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target jangka menengah.

e. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan Kinerja yang terjadi dari tahun 2022 ke tahun 2024 di pengaruhi berbagai hal diantaranya adalah :

1. Alih fungsi lahan menjadi usaha penambangan dan tidak adanya reklamasi lahan pasca galian tambang, sehingga meningkatkan potensi banjir, penurunan kualitas air akibat pestisida dari lahan pertanian.
2. Penanganan sampah dan drainase / got limbah rumah tangga belum terkelola dengan baik.
3. Penegakan hukum lemah, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Perda Lingkungan Hidup dan resiko bencana akibat penurunan kualitas lingkungan.
4. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan dan melakukan kajian yang mendalam terhadap permasalahan-permasalahan.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan dalam peningkatan kinerja capaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan integritas dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan seluruh stakeholder dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam implementasi produk hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Peningkatan kapaasitas perangkat daerah di Bidang lingkungan hidup, salah satu yang dapat dilakukan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk perangkat daerah tentang teknologi pengelolaan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat.
3. Melakukan kajian ilmiah terhadap status lingkungan hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar atau rujukan dalam pengambilan keputusan.
4. Mendorong ketertiban aktif masyarakat dan pelaku peduli dalam konservasi, preservasi dan rehabilitasi pada basis wilayah baik di kawasan hulu / pegunungan dan lahan kritis, kawasan dataran rendah.

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
3. Program Pengelolaan Persampahan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.34
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Tujuan 3

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	103.19	88	-15.19

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini dari 3 program sebesar Rp.6.976.382.800- dengan realisasi sebesar Rp.6.151.305.655,- dengan capaian sebesar 88%. Dibanding dengan capaian kinerja sebesar 103.19% , berarti Efisiensi dalam Penggunaan Sumber Daya sebesar -15.19.

g. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Program Pengendalian Pencemaran Ligkungan Hidup
- Program Pengelolaan Persamahan
- Program Penanggulangan Bencana

Sasaran 6 : Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.35
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 6

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2024(%)
Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	116.15	119.20	97.37

Dari realisasi Indikator kinerja yang mendukung sasaran 6 Indeks Resiko Bencana menunjukkan realisasi sebesar 119.20 dar target 116.15 dan Capaian Kinerja sebesar 97.37%, atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.36
Perkembangan Pencapaian Sasaran 6

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian(%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	118,85	119.20	119.20	84,59	97.25	97.37

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator ini dengan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 119.20 sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 97.37%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.37
Perbandingan Target Realisasi
Sasaran 6 dengan RPD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	119.20	114.15

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 119.20 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 114.15, perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran menurunnya indeks resiko bencana yaitu dengan meningkatkan koordinasi pentahelix urusan ketentraman, keterlibatan umum dan perlindungan masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait, dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, akademis, dunia usaha, media masyarakat.

Resiko Bencana digunakan untuk mengukur Mitigasi Bencana, angka koefisien Indeks berkisar antara 0-1, semakin mendekati 0 nilai Indeks, semakin tidak Meningkatnya Mitigasi Bencana dalam suatu wilayah.

Tingkat Mitigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir mengalami tren penurunan. Di tahun 2023, indeks Resiko menyentuh angka 119.20 Indeks tertinggi selama lima tahun terakhir dan mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2023 dan 2024, yang berarti Mitigasi Bencana semakin rendah. Sedangkan ditahun 2024 rasio gini Kabupaten Sidenreng Rappang turun dibandingkan dengan tahun lalu. Salah satu factor yang menyebabkan Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan yaitu *Resiko Bencana Terkait Perubahan Iklim Global, Perkembangan Pembangunan yang Pesat, Kurangnya Pengendalian Tata Ruang, Posisi Geograsi yang Rawan Bencana dan Kerentangan Sosial.*

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.38
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 6

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	119.20	88	-31.2

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 3 program sebesar Rp.6.976.382.800,- dengan realisasi sebesar Rp.6.151.305.655,- dengan capaian sebesar 88%. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 119.20%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar -31.2.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.

- Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Persamahan
- Program Penanggulangan Bencana

Tujuan 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.39
Target Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2024(%)
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58.36	68.51	117.39

Dari realisasi Indikator kinerja yang mendukung tujuan ini Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan realisasi sebesar 117.39 dari target 116.15 dan Capaian Kinerja sebesar 97.37%, atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.40
Perkembangan Pencapaian Tujuan 4

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian(%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	54.80	48,74	68.51	84,59	63.21	117.39

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator ini dengan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 68.51 sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 117.39%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.41
Perbandingan Target Realisasi
Tujuan 4 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68.51	64.07

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 68.51 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 64.07, perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut telah melampaui target.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Terdapat hampir semua indikator pada pelaksanaan RB telah memiliki skor/nilai pada portal Reformasi Birokrasi dan rekomendasi hasil evaluasi telah di tindak lanjuti, sehingga untuk indeks di tahun ini mengalami peningkatan dibanding hasil dari tahun lalu.

Untuk dapat lebih mewujudkan birokrasi yang mencapai sasaran adapun upaya perbaikan diantaranya melakukan monev terhadap perkembangan implementasi reformasi birokrasi dengan menyusun peta keterkaitan kebijakan, melaksanakan internalisasi

budaya kerja ASN BerAkhlaq. Dalam hal peningkatan kualitas reformasi birokrasi Hasil evaluasi dari Kemenpan RB selalu jadi pedoman untuk di tindak lanjuti berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik, birokrasi yang bersih dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima.

Permasalahan dalam hal penguatan implementasi Reformasi Birokrasi yaitu belum optimalnya komitmen pimpinan, implementasi unit kerja, dan pemilihan program untuk mencapai RB.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.42
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Tujuan 4

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	117.39	93	-24.39

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini terdiri dari 9 program sebesar Rp.163.656.625.600,- dan realisasi sebesar Rp.152.659.239.087,- dengan capaian sebesar 93%%. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 11.39%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indicator ini adalah sebesar -24.39 %.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.

- Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Program Penyelenggaran Pengawasan;
- Program Kepegawaian Daerah;
- Program Pendaftaran Penduduk;
- Program Pelayanan Penanaman Modal;
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.43
Target Capain Indikator Kinerja Sasaran 7

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2024(%)
Nilai SAKIP	Poin	65.89	65.08	98.77

Dari realisasi Indikator kinerja yang mendukung sasaran indikator Niali SAKIP menunjukkan realisasi sebesar 65.08 dari target 65.89 dan Capaian Kinerja sebesar 98.77%, atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.44
Perkembangan Pencapaian Sasaran 7

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian(%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Nilai SAKIP	Indeks	63.53	64.25	65.08	88.90	81.56	98.77

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator ini dengan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 65.08 sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 98.77%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.45
Perbandingan Target Realisasi
Sasaran 7 dengan RPD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Nilai SAKIP	Poin	65.08	72.44

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 65.08 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 72.44, perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Capaian kinerja sasaran pada tahun 2024 mencapai nilai 68.51 dengan predikat B, mengalami kenaikan nilai jika dibandingkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2023.

Upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah yaitu

- Mereviu dokumen perencanaan agar sasaran dan indikator kinerja lebih berorientasi hasil.
- Melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi indikator kinerja.
- Penyusunan laporan kinerja menyajikan realisasi kinerja yang telah sebelumnya diperjanjikan.
- Hasil evaluasi oleh inspektorat harus menjadi umpan balik perbaikan kedepannya bagi perangkat Daerah.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.46
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 7

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai SAKIP	65.08	82	-16

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini terdiri dari 3 program sebesar Rp.3.272.588.500,- dan realisasi sebesar Rp.2.680.235.588,- dengan capaian sebesar 82%. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 98.77%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar -16%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.

- Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- Program Kepegawaian Daerah;

Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.47
Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,33 (B)	75.46	93.93

Sumber data: Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran ini menunjukkan realisasi sebesar 75.46 dari target 80,33 dengan capaian kinerja yaitu sebesar 93.93% atau dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.48
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 8

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	78.85	77,41	75.46	93,51	87,62	93.93

Sumber data: Bappelitbangda Kab.Sidrap

Perbandingan antara Capaian kinerja untuk indikator ini dengan cenderung mengalami penurunan di tiap tahunnya dari tahun 2022-2024. Dengan Realisasi kinerja ditahun ini sebesar 75.46 dengan capaian 93.93%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.49
Perbandingan Target Realisasi
Sasaran 8 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	ondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	75.46	83.38

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 75.46 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 83.38, perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

a. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Kualitas pelayanan publik masih perlu di tingkatkan sebagai bentuk siap, yang diperoleh dengan cara membandingkan persepsi penerima layanan dan atas layanan yang nyata. Dalam factor pengukuran kualitas pelayanan agar pelayanan mempunyai persepsi yang baik terhadap penerima layanan. Di tahun ini indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan hal ini disebabkan kinerja pelayanan yang terus ditingkatkan oleh beberapa instansi pemerintah dengan penanganan dan pengaduan sudah dilakukan secara online, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Adapun pengaduan secara tidak langsung hal tersebut menjadi penilaian dari pengguna pelayanan publik, dimana dapat dijadikan pemacu dalam meningkatkan pelayanan yang baik dan cepat dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dengan tanggungjawab yang mesti diberikan kepada masyarakat yang dilayani.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.50
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 8

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	93.93	100	6

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.52
Perkembangan Pencapaian Sasaran 9

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	53.08	66.56	78.60	100	100	120.32

Sumber data: Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel tersebut indikator indeks Pengelolaan Keuangan Daerah belum ada pada IKU Penetapan tahun 2023, sehingga belum ada perbandingan dengan tahun sebelumnya, Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 78.60 dengan Capaian sebesar 120.32%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.53
Perbandingan Target Realisasi
Sasaran 9 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	78.60	75.65

Realisasi kinerja pada dengan tahun ini sebesar 788.60 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 75.65, perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut telah mencapai target.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilakukan dengan menghitung Rasio Keuangan dan Mengevaluasi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar Rp.2.946.308.600,- dengan realisasi sebesar Rp.2.940.863.153,- dengan capaian sebesar 100%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 93.93%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 6.

c. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Program Pendaftaran Penduduk;
- Program Pelayanan Penanaman Modal;
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Sasaran 9 :Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.51
Target Capain Indikator Kinerja Sasaran 9

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	65.33	78.60	120.32

Sumber data: Bappelitbagngda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran ini menunjukkan realisasi sebesar 78.60 dari target 65,33 dengan capaian kinerja yaitu sebesar 120.32% atau dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

(PAD). Faktor Kepemimpinan juga dapat menjadi salah satu penyebab keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.54
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 9

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	120.32	93	-27,32

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp.157.437.728.500,- dengan realisasi sebesar Rp.147.083.595.631,- dengan capaian sebesar 93%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 120.32%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indicator ini adalah sebesar -27,32.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.

- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah

3.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mendukung terwujudnya pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.55
Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	PENDAPATAN PERKAPITA	Rp. 88,155,196,615	Rp. 84,417,690,045	96
2	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	Rp. 85,169,298,615	Rp. 81,432,087,168	96
	- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 4,679,308,000	Rp. 4,190,181,398	90
	- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 9,246,289,000	Rp. 8,626,186,550	93
	- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 215,000,000	Rp. 214,991,715	100
	- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 150,000,000	Rp. 140,775,400	94
	- Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 1,288,781,000	Rp. 871,364,200	68
	- Program Pengembangan UMKM	Rp. 6,287,000,000	Rp. 6,112,391,000	97
	- Program Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)	Rp. 10,613,013,200	Rp. 8,586,289,490	81
	- Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 52,689,907,415	Rp. 52,689,907,415	100
3	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	Rp. 2,985,898,000	Rp. 2,985,602,877	100
	- Persentase Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. 1,600,898,000	Rp. 1,600,657,877	100
	- Program Hubungan Industrial	Rp. 1,385,000,000	Rp. 1,384,945,000	100
4	TINGKAT KEMISKINAN	Rp. 165,537,202,662	Rp. 152,117,811,088	92
5	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	Rp. 157,481,393,502	Rp. 145,346,944,941	92
6	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	Rp. 157,481,393,502	Rp. 145,346,944,941	92
	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 42,737,920,552	Rp. 37,741,072,618	88
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Bid.Kesehatan	Rp. 73,919,000	Rp. 73,798,000	100
	- Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 105,310,509,150	Rp. 98,467,394,233	94
	- Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Rp. 8,959,103,800	Rp. 8,669,312,750	97
	- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 399,941,000	Rp. 395,367,340	99

7	GINI RATIO	Rp. 8,055,809,160	Rp 6,770,866,147	84
	- Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 200,332,000	Rp. 174,727,597	87
	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 409,108,000	Rp. 245,140,800	60
	- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp. 69,000,000	Rp. 68,814,174	100
	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 2,122,760,000	Rp. 1,398,351,376	66
	- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 690,992,000	Rp. 670,992,000	97
	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 1,261,729,560	Rp. 1,007,308,115	80
	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Limbah Air	Rp. 3,301,887,600	Rp. 3,205,532,085	97
8	TINGKAT KRIMINALITAS	Rp. 9,178,144,000	Rp 8,810,303,310	96
	- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5,876,719,000	Rp. 5,857,006,000	100
	- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 748,330,000	Rp. 743,355,600	99
	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 2,553,095,000	Rp. 2,209,941,710	87
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Rp. 6,976,382,800	Rp 6,151,305,655	88
10	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Rp. 6,976,382,800	Rp 6,151,305,655	88
	- Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Rp. 58,929,500	Rp. 52,862,446	90
	- Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 6,625,255,000	Rp. 5,826,764,709	88
	- Program Penanggulangan Bencana	Rp. 292,198,300	Rp. 271,678,500	93
11	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Rp. 158,967,780,100	Rp 152,659,239,087	96
12	NILAI SAKIP	Rp. 3,272,588,500	Rp 2,680,235,588	82
	- Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 867,079,500	Rp. 713,287,186	82
	- Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1,766,490,000	Rp. 1,331,515,113	75
	- Program Kepegawaian Daerah	Rp. 639,019,000	Rp. 635,433,289	99

13	IKM	Rp. 2,946,308,600	Rp 2,940,863,153	100
	- Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 937,402,000	Rp. 932,712,200	99
	- Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 364,391,600	Rp. 363,966,375	100
	- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 1,644,515,000	Rp. 1,644,184,578	100
14	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 152,748,883,000	Rp 147,038,140,346	96
	- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 635,918,500	Rp. 466,618,043	73
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.688.845.500	Rp. 4,487,926,672	96
	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 152,112,964,500	Rp. 142,083,595,631	93

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN 2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.260.439.388.000,00,-. Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi - strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019–2023 diarahkan kepada:

1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Upaya-upaya efektif dalam penggalan sumber - sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah

saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi lebih banyak didominasi oleh sector primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber- sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan kedalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

TABEL : 3.56
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.260.439.388.000,00	1.247.492.377.583,80	98,97	1.196.103.914.164,13
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	183.429.202.000,00	184.954.601.357,80	100,83	171.420.397.746,00
4.1.01	Pajak Daerah	52.884.000.000,00	51.700.996.630,00	97,76	48.396.308.690,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	110.000.000,00	112.463.000,00	102,24	90.142.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.750.000.000,00	1.771.354.790,00	101,22	1.782.428.397,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	70.000.000,00	51.201.000,00	73,14	65.084.250,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.700.000.000,00	1.499.875.553,00	88,23	651.194.795,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	23.570.000.000,00	24.282.062.802,00	103,02	21.643.979.866,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	250.000.000,00	384.566.510,00	153,83	306.716.636,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	14.000.000.000,00	11.291.614.719,00	80,65	11.386.249.101,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.344.000.000,00	12.307.858.256,00	108,50	12.470.513.645,00
4.1.02	Retribusi Daerah	12.087.584.000,00	8.982.380.217,00	74,31	9.817.068.958,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	9.754.455.000,00	7.536.463.219,00	77,26	8.487.952.997,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	831.129.000,00	693.596.900,00	83,45	492.750.324,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.502.000.000,00	752.320.098,00	50,09	836.365.637,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.742.500.000,00	5.742.455.882,00	100,00	5.693.280.114,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.742.500.000,00	5.742.455.882,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	0,00	0,00	5.693.280.114,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	112.715.118.000,00	118.528.768.628,80	105,16	107.513.739.984,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	674.034.000,00	1.423.550.800,00	211,20	12.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	925.000.000,00	789.160.774,59	85,31	231.825.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.350.000.000,00	2.043.001.835,00	151,33	1.704.570.011,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0,00	23.433.109,00	0,00	56.565.319,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	750.000.000,00	5.151.779.270,00	686,90	1.490.320.984,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	5.016.506,00	0,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00	578.105.087,00	38,54	218.810.572,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	200.000.000,00	120.805.884,00	60,40	217.504.582,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	16.000.000,00	17.312.216,00	108,20	26.299.788,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	500.000.000,00	311.196.158,61	62,24	632.280.372,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	106.800.084.000,00	108.065.209.488,60	101,18	98.056.532.329,00
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	4.866.043.527,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	197.500,00	0,00	987.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	183.429.202.000,00	184.954.601.357,80	100,83	171.420.397.746,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.069.580.331.000,00	1.056.467.147.194,00	98,77	1.022.769.516.418,13
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982.794.246.000,00	988.330.791.026,00	100,56	931.622.355.227,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	916.178.539.000,00	921.641.974.026,00	100,60	849.822.898.227,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	916.178.539.000,00	921.641.974.026,00	100,60	849.822.898.227,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	20.900.516.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	66.615.707.000,00	66.688.817.000,00	100,11	81.799.457.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	86.786.085.000,00	68.136.356.168,00	78,51	91.147.161.191,13
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	79.579.000.000,00	63.064.400.168,00	79,25	80.388.580.691,13
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	7.207.085.000,00	5.071.956.000,00	70,37	10.758.580.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	86.786.085.000,00	68.136.356.168,00	78,51	91.147.161.191,13
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.069.580.331.000,00	1.056.467.147.194,00	98,77	1.022.769.516.418,13
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.429.855.000,00	6.070.629.032,00	81,71	1.914.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.314.000.000,00	1.434.000.000,00	61,97	1.914.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	1.314.000.000,00	0,00	1.794.000.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.314.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.000.000.000,00	120.000.000,00	12,00	120.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.115.855.000,00	4.636.629.032,00	90,63	0,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.115.855.000,00	4.636.629.032,00	90,63	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.429.855.000,00	6.070.629.032,00	81,71	1.914.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.260.439.388.000,00	1.247.492.377.583,80	98,97	1.196.103.914.164,13
5	BELANJA DAERAH	1.325.413.077.000,00	1.266.425.018.831,82	95,55	1.151.082.329.008,64
5.1	BELANJA OPERASI	999.581.331.000,00	958.598.105.396,96	95,90	838.487.824.716,64
5.1.01	Belanja Pegawai	551.487.819.552,00	540.153.881.905,00	97,94	472.483.506.773,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	400.517.864.046,00	393.974.162.838,00	98,37	340.971.288.621,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	29.728.607.013,00	29.437.866.973,00	99,02	20.423.979.328,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	101.216.485.493,00	100.508.438.263,00	99,30	96.215.508.934,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.931.454.000,00	13.547.879.079,00	80,02	13.541.779.170,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	172.570.720,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	818.526.000,00	461.640.000,00	56,40	710.880.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.766.625.003,00	347.710.163.276,96	92,53	335.407.215.461,64
5.1.02.01	Belanja Barang	59.806.143.258,00	52.841.699.492,00	88,35	55.407.757.779,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	99.046.481.399,00	91.291.925.901,96	92,17	79.782.077.467,04
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.216.320.500,00	7.198.282.839,00	87,61	6.210.182.888,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41.862.671.125,00	37.153.217.178,00	88,75	38.478.071.555,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.228.069.000,00	13.566.293.562,00	95,35	36.816.626.226,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	32.255.436.307,00	29.141.243.795,00	90,35	29.384.381.077,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.820.097.000,00	8.658.887.394,00	88,18	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	110.531.406.414,00	107.858.613.115,00	97,58	89.328.118.469,60
5.1.03	Belanja Bunga	335.000.000,00	288.275.997,00	86,05	478.773.090,00
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	335.000.000,00	288.275.997,00	86,05	478.773.090,00
5.1.05	Belanja Hibah	71.703.486.445,00	70.267.593.078,00	98,00	29.866.376.892,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.589.383.000,00	3.572.779.000,00	99,54	1.962.496.000,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.981.338.000,00	3.967.000.000,00	99,64	2.940.377.430,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	53.493.939.445,00	52.269.818.344,00	97,71	24.214.505.210,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.685.166.000,00	2.609.019.734,00	97,16	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	833.260.000,00	833.229.000,00	100,00	748.998.252,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	7.120.400.000,00	7.015.747.000,00	98,53	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	288.400.000,00	178.191.140,00	61,79	251.952.500,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	138.400.000,00	135.400.000,00	97,83	32.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	42.791.140,00	28,53	219.952.500,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	999.581.331.000,00	958.598.105.396,96	95,90	838.487.824.716,64
5.2	BELANJA MODAL	179.755.151.000,00	171.335.441.547,86	95,32	195.445.221.620,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	895.417.000,00	541.312.000,00	60,45	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	895.417.000,00	541.312.000,00	60,45	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.458.706.635,00	43.971.274.302,00	90,74	28.809.927.970,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.520.360.000,00	1.404.870.500,00	92,40	3.675.030.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.940.650.000,00	4.652.800.000,00	94,17	2.320.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.660.603.550,00	3.978.821.653,00	85,37	2.846.090.558,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	98.463.000,00	81.811.634,00	83,09	2.340.253.950,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	19.808.575.995,00	17.479.631.560,00	88,24	2.054.945.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.314.535.000,00	1.306.160.000,00	99,36	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.196.007.289,00	6.425.045.911,00	89,29	4.036.612.720,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.890.000.000,00	1.887.000.000,00	99,84	32.079.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.916.076.952,00	54.199.987.160,86	98,70	82.185.556.904,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	47.893.770.252,00	47.200.850.534,75	98,55	81.620.355.664,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.632.306.700,00	6.609.136.626,11	99,65	351.582.240,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	390.000.000,00	390.000.000,00	100,00	213.619.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.616.365.720,00	63.411.175.975,00	95,19	84.109.936.746,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	57.936.599.820,00	56.450.720.685,00	97,44	79.177.088.461,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.385.456.100,00	5.666.145.490,00	76,72	3.497.944.879,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.294.309.800,00	1.294.309.800,00	100,00	1.415.947.906,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	18.955.500,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.868.584.693,00	9.211.692.110,00	103,87	339.800.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	503.000.000,00	499.484.000,00	99,30	150.000.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	390.000.000,00	389.999.999,00	100,00	189.800.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.975.584.693,00	8.322.208.111,00	104,35	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	179.755.151.000,00	171.335.441.547,86	95,32	195.445.221.620,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	2.058.430.500,00	41,17	740.788.040,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	2.058.430.500,00	41,17	740.788.040,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	2.058.430.500,00	41,17	740.788.040,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000,00	2.058.430.500,00	41,17	740.788.040,00
5.4	BELANJA TRANSFER	141.076.595.000,00	134.433.041.387,00	95,29	116.408.494.632,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.308.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.341.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	134.426.595.000,00	134.433.041.387,00	100,00	116.408.494.632,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	134.426.595.000,00	134.433.041.387,00	100,00	116.408.494.632,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	141.076.595.000,00	134.433.041.387,00	95,29	116.408.494.632,00
	JUMLAH BELANJA	1.325.413.077.000,00	1.266.425.018.831,82	95,55	1.151.082.329.008,64
	SURPLUS/DEFISIT	(64.973.689.000,00)	(18.932.641.248,02)	29,14	45.021.585.155,49
6	PEMBIAYAAN DAERAH	64.973.689.000,00	64.974.600.657,49	100,00	22.227.102.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67.248.689.000,00	67.248.687.155,49	100,00	24.477.102.422,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.248.689.000,00	67.248.687.155,49	100,00	24.477.102.422,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	67.248.689.000,00	67.248.687.155,49	100,00	24.477.102.422,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67.248.689.000,00	67.248.687.155,49	100,00	24.477.102.422,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.275.000.000,00	2.274.086.498,00	99,96	2.250.000.422,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.275.000.000,00	2.274.086.498,00	99,96	2.250.000.422,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	2.275.000.000,00	2.274.086.498,00	99,96	2.250.000.422,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.275.000.000,00	2.274.086.498,00	99,96	2.250.000.422,00
	PEMBIAYAAN NETTO	64.973.689.000,00	64.974.600.657,49	100,00	22.227.102.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	46.041.959.409,47	0,00	67.248.687.155,49

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran – sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama,

Hampir keseluruhan indikator dapat terukur, sehingga kinerja penetapan indikator untuk tahun 2024 telah dapat dibandingkan dengan tahun lalu.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi Pemerintah ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam rangka perbaikan system monitoring, evaluasi, pengendalian capaian kinerja dan pelaporan kinerja, maka upaya pengembangan terhadap e-Sakip perlu terus dilakukan terutama berkaitan dengan penambahan fitur dan aplikasi baru yang mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dimasa yang akan datang.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024, belum mencapai target. Masih terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

Pangkajene Sidenreng, 17 Maret 2025



SYAHARUDDIN ALRIF

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Harapan Baru Kompleks OPD, Blok C No.17 Pangkajene Sidenreng
Nomor Telepon/ Fax : 0421-3590015, email_inspektoratsidrap@gmail.com
SULAWESI SELATAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pangkajene Sidenreng, 21 Maret 2025

INSPEKTORAT DAERAH
SIDENRENG RAPPANG,



Drs. MUSTARI KADIR, M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19680191991121002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya Produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	1	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	53.97	59.31	110 %
		2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.76	4.05	70 %
2	Meningkatnya akses dan kesempatan Kerja	3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.47	3.02	87%
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4.52	5.02	111%
		5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73.21	74.81	102%
		6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.66	92.66	99,85%
4	Berkurangnya Ketimpangan Pendapatan	7	Gini Ratio	Poin	0.354	0.63	94.16%
5	Membaiknya Kehidupan Sosial Kemasyarakatan	8	Tingkat Kriminalitas yang tertangani	Persen	77.2	0,63	94,16%
		9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64.05	67.86	106%
6	Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	10	Indeks Resiko Bencana	Indeks	116.15	119.2	103%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58.36 (CC)	68.51 (B)	117%
		12	Nilai Sakip	Poin	65.89 (B)	65.08 (B)	99%
8	IKM	13	IKM	Persen	80.33 (B)	75.455	94%
9	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	65.33	78.603	120%

**RENCANA KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	1	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	56.54
		2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6.17
2	Meningkatnya akses dan kesempatan Kerja	3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.42
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4.13
		5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73.73
		6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.89
4	Berkurangnya Ketimpangan Pendapatan	7	Gini Ratio	Poin	0.338
5	Membaiknya Kehidupan Sosial Kemasyarakatan	8	Tingkat Kriminalitas yang tertangani	Persen	78.20
		9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66.55
6	Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	10	Indeks Resiko Bencana	Indeks	115.15
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61.15 (B)
		12	Nilai Sakip	Poin	68.82 (B)
8	IKM	13	IKM	Persen	83.38 (B)
9	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	75.65



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. B A S R A**

Jabatan : **Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

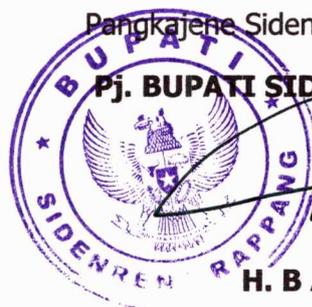
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

H. BASRA



**PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	1	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	53,97
		2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,76
2	Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,47
3	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,52
		5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,21
		6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,66
4	Berkurangnya Ketimpangan Pendapatan	7	Gini Ratio	Poin	0,354
5	Membbaiknya Kehidupan Sosial kemasyarakatan	8	Tingkat Kriminalitas yang Tertangani	Persen	77,2
		9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64,05
6	Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	10	Indeks Resiko Bencana	Indeks	119,2
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,36 (CC)
		12	Nilai SAKIP	Poin	65,89 (B)
8	IKM	13	IKM	Persen	80,33 (B)
9	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	65,33

No	Program	Anggaran	
1.	PENDAPATAN PERKAPITA	Rp.	75.351.765.000
2	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	Rp.	73.087.627.000
	- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	575.000.000
	- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	8.147.853.000
	- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	274.000.000
	- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.	150.000.000
	- Program Penyuluhan Pertanian	Rp.	1.003.000.000
	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	3.000.000.000
	- Program Pengembangan UMKM	Rp.	1.000.000.000
	- Program Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)	Rp.	10.856.310.000
	- Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	48.081.464.000
3	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	Rp.	2.264.138.000
	- Persentase Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp.	1.004.685.000
	- Program Hubungan Industrial	Rp.	1.259.453.000
4	TINGKAT KEMISKINAN	Rp.	201.943.836.300
5	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	Rp.	193.687.807.100
6	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	Rp.	193.687.807.100
	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	88.452.803.300
	- Program Peremberdayaan Masyarakat Bid.Kesehatan	Rp.	500.000.000
	- Program Pengelolaan Pendidikan	Rp.	500.000.000
	- Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Rp.	500.000.000
	- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	500.000.000
7	GINI RATIO	Rp.	2.605.000.000
	- Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	1.200.000.000
	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	500.000.000
	- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp.	305.000.000

	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	600.000.000
	- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp.	100.000.000
	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	1.100.000.000
	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Limbah Air	Rp.	2.100.000.000
8	TINGKAT KRIMINALITAS	Rp.	5.651.029.200
	- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.	2.042.279.200
	- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	650.000.000
	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	2.958.750.000
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Rp.	6.048.622.700
10	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Rp.	6.048.622.700
	- Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Rp.	190.000.000
	- Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	5.378.622.700
	- Program Penanggulangan Bencana	Rp.	480.000.000
11	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Rp.	132.562.938.487
12	NILAI SAKIP	Rp.	132.562.938.487
	- Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	500.000.000
	- Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	2.367.285.000
	- Program Kepegawaian Daerah	Rp.	52.500.000
13	IKM	Rp.	3.160.016.000
	- Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	600.000.000
	- Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	202.500.000
	- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	2.357.516.000
14	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp.	126.483.137.487
	- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	400.000.000

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	3.185.000.000
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	122.898.137.487

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2024



Pj. **BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

H. BASRA

DAFTAR PENGHARGAAN SIDRAP 2024

NO	NAMA PENGHARGAAN	ASAL PENGHARGAAN	WAKTU PENYERAHAN	TEMPAT PENYERAHAN	HADIR MENERIMA
1	Piala Adipura Kategori Kota Kecil tahun 2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI	Selasa (5/3/2023)	Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat	Penjabat (Pj) Bupati Sidrap, H. Basra
2	Penghargaan atas Piala Adipura tahun 2023 Kategori Kota Kecil	Pj. Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin	Jumat (15/03/2024)	Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Muhammad Yusuf
3	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 secara beruntun	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.	Senin (27/5/2024)	Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Jl. A.P. Pettarani Makassar	Pj. Bupati Sidrap, H. Basra
4	Universal Health Coverage.	Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin	Kamis (8/8/2024)	Jakarta	Pj. Bupati Sidrap, H. Basra
5	Penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Terbaik tahun 2024 untuk Wilayah Sulawesi.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Senin (23/9/2024).	Hotel Indonesia Kempiski Jakarta Pusat,	Pj. Bupati Sidrap, H. Basra
6	Desa Bina Baru, Kecamatan Kulo meraih juara II Lomba Desa Ketahanan Pangan	Penjabat (Pj.) Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh	Sabtu (19/10/2024)	Gedung DPRD Sulsel	Kepala Desa Bina Baru, Dayadi, disaksikan Pj. Bupati Sidrap, H. Basra.
7	Juara harapan I lomba menu display festival pangan B2SA (beragam, bergizi, seimbang, dan aman) oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidrap	TP PKK Sulsel	Kamis (23/10/2024)	Hotel Myko, Makassar	Hj. Hafni Basra selaku Penjabat Ketua TP PKK Sidrap,
8	Penghargaan dalam hal penyampaian dokumen syarat penyaluran dana desa tahap II Tahun 2024 tercepat, wilayah KPPN Tipe A1 Parepare.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Parepare	Kamis (24/10/2024)	Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Sidrap	Penjabat (Pj.) Bupati Sidrap, H. Basra

NO	NAMA PENGHARGAAN	ASAL PENGHARGAAN	WAKTU PENYERAHAN	TEMPAT PENYERAHAN	HADIR MENERIMA
9	Mohammad Syafei Awards kategori Empowered Education Management kepada Penjabat Bupati Sidrap, Dr. Ns. H. Basra, S.Kep., M.Kes .	Yayasan Guru Belajar	Sabtu (2/11/2024)	Pos Bloc, Jakarta	Penjabat (Pj.) Bupati Sidrap, H. Basra
10	Fajar Award 2024 untuk kategori "Lumbung Pangan Sulawesi Selatan".	Komisaris Utama Fajar Indonesia, HM Agus Salim Alwi Hamu	Kamis (7/11/2024)	Ballroom Phinisi Hotel Claro, Makassar	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Anis Dachlan
11	Juara III ASN Digital, dengan parameter porsi ASN yang mengaktifasi m-banking dan bertransaksi QRIS via Bank Sulselbar.	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan	Rabu (11/12/2024)	Pinisi 2 Ballroom, Claro Hotel Makassar.	Penjabat (Pj.) Bupati Sidrap, H. Basra
12	Juara III e-Commerce PBB-P2 Akseleratif, dengan parameter pertumbuhan volume dan nominal transaksi, serta pangsa transaksi terhadap total realisasi PBB-P2 .	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan	Rabu (11/12/2024)	Pinisi 2 Ballroom, Claro Hotel Makassar.	Penjabat (Pj.) Bupati Sidrap, H. Basra